

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Fitrah Ramadhan

NPP. 29.1382

Asdaf Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: Fitrahmdn234@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Regional financial performance is one of the indicators in assessing the implementation of regional autonomy. However, there are still problems related to the financial performance of Bulukumba Regency, such as the high transfer of funds to the local revenue of Bulukumba Regency. **Objective:** This study aims to analyze the regional financial performance of Bulukumba Regency using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio. **Methods:** This study uses a descriptive research method with an inductive qualitative approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of the research that have been carried out show that in general the financial performance of the Bulukumba Regency is still relatively low, which can be seen from several financial ratios of Bulukumba Regency in 2020, including the ratio of regional financial independence of Buukumba Regency of 13.49%, the effectiveness ratio of 95,60 %, efficiency ratio 84,37 %, compatibility ratio 76.25%, and growth ratio -2,63%. In addition, the performance of the Bulukumba Regency BPKD has been effective, but in the implementation of regional financial management there are still some problems because there are inhibiting factors that hinder the process of regional financial performance in Bulukumba Regency. **Conclusion:** the conclusion in this study shows that the regional financial performance of Bulukumba Regency is still relatively low because the ratios used as measurements show that the numbers are not maximized because there are several inhibiting factors.

Keywords: *Performance, Finance, and Ratio*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan daerah adalah salah satu indikator dalam penilaian pelaksanaan otonomi daerah. Namun masih terdapat permasalahan terkait dengan kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba seperti masih tingginya dana transfer terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan Kabupaten

Bulukumba pada tahun 2020 antara lain rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba sebesar 13,49 %, rasio efektivitas 95,60 %, rasio efisiensi 84,37 %, rasio keserasian 76,25 %, dan rasio pertumbuhan -2,63 %. Selain itu kinerja BPKD Kabupaten Bulukumba telah efektif namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih mengalami beberapa masalah karena terdapat faktor-faktor penghambat yang ada sehingga menghambat proses kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah karena rasio – rasio yang digunakan sebagai pengukuran menunjukkan angka yang belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor – faktor penghambat.

Kata kunci: *Kinerja, Keuangan, dan Rasio*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesuksesan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya apakah telah sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah tersebut termasuk dalam hal pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan diperlukan kemampuan keuangan daerah karena tanpa biaya yang cukup pemerintah akan terhambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Keuangan daerah inilah yang menjadi salah satu dimensi untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengilustrasikan pembiayaan kegiatan tugas pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen 3 utama dalam penentuan arah kebijakan pemerintah daerah harus memuat kinerja yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian guna menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pendapatan dan belanja daerah merupakan alat yang digunakan APBD untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya pembangunan daerah, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber perumusan ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi untuk semua kegiatan unit kerja yang berbeda. Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian kondisi keuangan suatu organisasi atau keuangan sebuah institusi yang dapat diukur dengan metode tertentu yang memberikan kesimpulan akan keberhasilan suatu organisasi atau institusi dalam mengelola keuangan. Penting dan menarik untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan mengkaji kinerja keuangan dapat diketahui hasil dari program dan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seberapa optimal pemerintah daerah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjalankan otonomi daerah dan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil audit BPK-RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016-2019, namun pada tahun 4 2020 menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum konsisten dalam mengelola keuangan. Penilaian WDP pada pengelolaan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah masih

lemah dalam mengelola keuangannya. Salah satu indikator penyebab buruknya sistem keuangan yaitu terlalu banyak kejanggalan arus anggaran baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran. Kinerja keuangan daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan alokasi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat rendah, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 12,8 %. Ini menunjukkan kurangnya pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna menambah PAD. Selain permasalahan ketergantungan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bulukumba, permasalahan lain juga datang dengan adanya Covid-19 yang menyebabkan pengalihan anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Bulukumba antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2018-2020, khususnya dalam hal kinerja keuangan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran tingkat pencapaian kondisi keuangan suatu organisasi atau keuangan sebuah institusi yang dapat diukur dengan metode tertentu yang memberikan kesimpulan akan keberhasilan suatu organisasi atau institusi dalam mengelola keuangan. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjalankan otonomi daerah dan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil audit BPK-RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016-2019, namun pada tahun 4 2020 menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum konsisten dalam mengelola keuangan. Ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi karena tiga tahun secara berturut-turut (2016-2019) mendapatkan opini (WTP) dan pada tahun 2020 memiliki opini yang menurun (WDP) sehingga perlu untuk dianalisis penyebab kesenjangan ini.

Kinerja keuangan daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan alokasi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah. Namun berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat rendah, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 12,8 % dan untuk Kabupaten Bulukumba sendiri menunjukkan kontribusi PAD masih 15,32% pada tahun 2018. Ini merupakan kesenjangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Bulukumba yang seharusnya dapat mengoptimalkan potensi daerah lebih dari itu namun pada kenyataannya belum bisa mencapai target yang diinginkan. Sehingga perlu untuk meneliti terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna mengetahui hambatan yang dihadapi dan mencari solusinya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulis juga melihat dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas sebagai bahan perbandingan untuk penulis dalam melaksanakan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan rujukan dan bahan perbandingan guna membantu dan menyempurnakan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Penelitian yang pertama yang digunakan penulis sebagai bahan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Dora, 2017)** dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014 yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (mix methods). Penelitian ini menyatakan bahwa secara umum kinerja pemerintahan Kota Jogjakarta sudah baik terlihat dari rasio keuangan yang dipakai untuk pengukuran menunjukkan hasil yang bertumbuh secara positif. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Hakim, 2018)** yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016 dengan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (mix methods). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman secara umum dikatakan baik karena rasio dan indikator penelitian yang digunakan menunjukkan hasil yang lebih dari cukup. Selanjutnya penelitian acuan yang ketiga adalah **(Rahmayati, 2013)** yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 dengan metode penelitian analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Penelitian yang digunakan penulis sebagai rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Paramitha dkk, 2014)** yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Penelitian acuan yang terakhir adalah **(Mutih, 2016)** dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014 yang menggunakan metode penelitian penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan pertama yaitu dari penelitian (Dora, 2017) memiliki konsep yang berda dengan penulis karena teori kinerja keuangan daerah dari Halim sebagai landasan teoritis; sedangkan penulis menggunakan teori dari Mahmudi sebagai landasan teoritis. Terdapat perbedaan pada konsep penelitian yaitu Juliana dora hanya ingin mengetahui kinerja pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; sedangkan penulis ingin mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah beserta dengan faktor penghambat pemerintah daerah dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Selain itu penelitian penulis juga memiliki perbedaan konsep dengan penelitian yang dibuat oleh (Halim, 2018) yang menggunakan konsep teori kinerja keuangan dari Bisma sebagai landasan teoritis penyusunan konsep operasional kinerja keuangan; sedangkan penulis menggunakan teori kinerja keuangan dari Mahmudi sebagai landasan teoritis penyusunan konsep operasional.

Selain dari segi konsep teori, peneliti juga memiliki metode yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yaitu dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian (Hakim, 2018) dan (Dora, 2017) menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (mix methods) untuk mengungkap dan membahas obyek penelitian. Selain itu, penelitian yang dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga kebaruan penelitian ini sudah cukup guna memenuhi syarat penelitian baru.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, mencari faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan guna menangani hambatan yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, mencari faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan guna menangani hambatan yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Analisis laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:89) yang menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menentukan aktivitas kinerja keuangan yang hasilnya digunakan sebagai dasar analisis keputusan ekonomi, sosial atau politik. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yang dapat digunakan yaitu analisis pertumbuhan berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan berupa rasio

kemandirian dan rasio efektivitas. Berikut adalah penjelasan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba beserta dimensi – dimensinya:

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tentu akan mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dimasa pandemi. Keuangan menjadi bagian yang sangat penting dari suatu aktivitas pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan yang akan dicapai, yang dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah. Hal ini berarti, kinerja keuangan harus dapat ditangani dengan baik oleh para pengelola keuangan agar kinerja keuangan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba penulis menggunakan perhitungan beberapa rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Pada rasio pertama yaitu **rasio kemandirian keuangan daerah** merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bulukumba masih sangat rendah sekali karena tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba berada pada interval antara 0-25%, tepatnya pada kisaran 11-13 %. Rasio pengukuran selanjutnya adalah **Rasio Efektivitas** yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang di tetapkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) suatu daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018-2020 tingkat efektivitasnya dapat dikatakan efektif karena selama tahun anggaran 2018- 2020 rasio efektivitas PAD Kabupaten Bulukumba berada pada skala interval kriteria 90-100% yang tergolong bahwa Kabupaten Bulukumba efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD. Artinya kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari rasio efektivitas PAD sudah cukup baik, terbukti dalam mencapai tujuan yang ditargetkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berarti pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Rasio ketiga adalah **Rasio Efisiensi** yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisien belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. besarnya rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba terletak pada kriteria “Cukup Efisien”, karena hasil yang diperoleh pada perbandingan antara total realisasi belanja daerah terhadap pendapatan daerah berada pada rentang dari 80-90 %. Selanjutnya adalah rasio keempat yaitu **Rasio Aktivitas (Keserasian)** yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara maksimal. Hasil dari pengukuran rasio ini menunjukkan bahwa rasio keserasian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba masih mengutamakan belanja operasi yaitu belanja rutin. Akan tetapi belanja modal yaitu belanja pembangunan sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakatnya. Rasio pengukuran yang terakhir adalah **Rasio Pertumbuhan** yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Hasil dari pengukuran rasio ini menyatakan bahwa masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan baik dalam hal peningkatan potensi daerah, pengefisienan belanja

daerah dan pengurangan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berikut adalah gambaran secara umum terkait dengan pemenuhan rasio-rasio pengukuran yang digunakan oleh penulis.

Tabel 1
Rangkuman Hasil Penelitian Berdasarkan Nilai Rasio

<i>no</i>	<i>Rasio</i>	<i>Hasil</i>	<i>Ket</i>
1	kemandirian keuangan daerah	11-13 %.	Belum
2	Efektifitas	90-100%	terpenuhi
3	Efisiensi	80-90 %.	Cukup
4	Aktivitas (Keserasian)	76,25 %	Belum
5	Pertumbuhan	-2,63	Belum

3.2. Faktor – Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan itu sendiri. Adapun faktor-faktor penghambat sesuai dengan indikator masing-masing rasio yang telah digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam mengelola keuangan. Ada beberapa actor yang menghambat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu a) Masih kurangnya PAD dari Kabupaten Bulukumba selama empat tahun anggaran dibandingkan dengan pendapatan transfer yang selalu besar setiap tahunnya. b) Penggunaan dana PAD yang masih kurang efisien sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran dan mengalami kendala. c) Banyaknya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKD Kabupaten Bulukumba yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk memperkerjakan tenaga kontrak yang lebih berkompeten pada bidangnya. d) Ketidakstabilan kinerja organisasi karena sering terjadi keterlambatan dalam penyeteroran laporan dari SKPD kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

3.3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sekaligus meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba adalah : a) Pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan asli daerah. b) Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dalam hal ini pegawai-pegawai yang mau ataupun yang sudah memiliki dasar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ataupun sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan. Terkhususnya pada bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu meneliti tentang kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 antara lain rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba sebesar 13,49 %, rasio efektivitas 95,60 %, rasio efisiensi 84,37 %, rasio keserasian 76,25 %, dan rasio pertumbuhan -2,63 %. Data tersebut menunjukkan kinerja yang belum maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal. Temuan ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dora, 2017), Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis keuangan daerah pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 secara umum dapat dikatakan baik, walaupun dari segi ketergantungan dan juga kemandirian memiliki hasil yang masih tinggi atau belum maksimal dalam memanfaatkan potensi daerah.

Dilihat dari rasio efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2018- 2020. Pada tahun 2018 terlihat bahwa rasio efektifitas 95,34 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu 97,15 % serta pada tahun 2020 kembali ke angka 95,60 %. Tingkat efektifitas PAD dari tahun 2018-2020 tersebut sangat mempengaruhi keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. Tingkat efektifitas PAD yang paling baik adalah pada tahun 2019 yakni sebesar 97,15% dengan skala interval menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tersebut Kabupaten Bulukumba berada pada interval 90-100% dengan kriteria “Efektif”. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan sebelumnya dengan hasil bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2010-2016 mempunyai angka rata-rata 104,52% berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2018).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba melalui data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder serta hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 antara lain rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buukumba sebesar 13,49 %, rasio efektivitas 95,60 %, rasio efisiensi 84,37 %, rasio keserasian 76,25 %, dan rasio pertumbuhan -2,63 %. Selain itu kinerja BPKD Kabupaten Bulukumba telah efektif namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih mengalami beberapa masalah karena terdapat faktor-faktor penghambat yang ada sehingga menghambat proses kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan yang dihadapi adalah Pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dalam hal ini pegawai-pegawai yang mau ataupun yang sudah memiliki dasar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah ataupun sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan.

Terkhususnya pada bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan seluruh jajaran pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan penggalian informasi guna menyukkseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rondonuwu, G. 2016. “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2014*”
- Siregar, O. K. dan F. Yani. 2021. “*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat)*”. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Vol.11. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Baso, R. dkk. 2020. “*Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*”. *Tangible Journal* Vol.5. STIE Tri Dharma Nusantara
- Juliana, D. 2017. *Analisis Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta: Yogyakarta*
- Mochammad F., H. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Yogyakarta*
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: PT Ghalia Indonesia Patarai, I M. 2018. *Kinerja Keuangan Daerah Cetakan ke-2. Makassar: De La Macca*
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish
- Sinambela, L P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinurat, M. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia